

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang taat pada peraturan dan dapat melayani masyarakat secara optimal. Dalam pelayanan terhadap masyarakat, komponen penting yang dapat menunjang dari salah satu kegiatan operasional yaitu aset tetap. Aset negara merupakan suatu kekayaan negara yang dimiliki oleh negara dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu pertanggungjawaban atas pemerintah untuk rakyat mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Aset tetap yang dapat menunjang dari suatu kegiatan operasional adalah seperti bangunan, tanah, peralatan dan mesin serta lain sebagainya. Secara resmi aset tetap pemerintah diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk dapat meningkatkan suatu akuntabilitas pemerintah dari penyajian laporan keuangan, maka peraturan pemerintah yang menjadi pedoman adalah peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan yang berhubungan aset tetap dengan perlakuan akuntansi kini telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) tentang akuntansi aset tetap yang terdapat dalam lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010. Dalam Perlakuan akuntansi aset tetap pernyataan standar akuntansi yaitu aset tetap yang dimiliki pemerintah antara lain yaitu pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan.

“Menurut Ambarawati dan Payamta (2015) berpendapat bahwa pemerintah daerah/kota merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan akuntansi sektor publik.” Bagian dari Sektor Publik Salah satunya adalah pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan atau pertanggungjawab pada pelaporan laporan keuangannya. “Menurut Sulistyowati (2015) berpendapat bahwa laporan

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.”

Pada saat ini dalam perkembangan ilmu teknologi informasi (TI) yang begitu pesat dan memberikan kemudahan dalam berbagai proses untuk aspek kegiatan. Dalam bidang administrasi untuk perkembangan teknologi yang dapat merubah dari yang semula administrasi manual kini menjadi administrasi komputerisasi karena untuk pengelolaan administrasi secara manual ada sebagian potensi yaitu kesalahan dalam pencatatan, kurangnya pengawasan dan prediksi kebutuhan dimasa yang akan datang menjadi terhambat. Perubahan tersebut diharapkan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam hal pencatatan, pengarsipan, dan pengorganisasian sebuah data. Peranan dari TI dalam berbagai aspek kegiatan yang dapat dipahami karena sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan menggunakan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan secara cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.

Sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologikomunikasi dan informasi untuk dapat memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi aset/kekayaan negara dalam satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga pusat maupun instansi daerah. Tujuan dari penatausahaan Barang Milik Negara adalah mendukung tertibnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan mewujudkan tertib dalam administrasi, maka dari itu kepatuhan atau ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Pernyataan No. 07);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK BMN) merupakan salah satu solusi untuk pengelolaan aset/kekayaan negara. Dalam mengelola aset/kekayaan negara dengan adanya simak bmn merupakan langkah mudah untuk memulai pekerjaan yang dari awalnya manual kini ke elektronik dan dapat lebih dimengerti oleh setiap petugas penanggung jawab dan pencatat aset/kekayaan barang milik negara baik di tingkat satuan kerja (satker) maupun tingkat kementerian. Salah satu bentuk pemanfaatan penggunaan teknologi informasi pemerintah dalam mengatasi pengelolaan dan penatausahaan aset/kekayaan negara di Indonesia adalah penerapan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya dalam pertanggungjawaban aset tetap penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dan bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang (BNNK Karawang), sehingga penulis dapat menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP, PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan?
2. Apakah Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi sudah dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka dalam tujuan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui proses berjalannya Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini manfaat yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah:

1. Manfaat Teoritis

- Dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dengan mempelajari realitas dan fakta yang ada di lapangan. Dari penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan khususnya mengenai Perlakuan Akuntansi pada Aset Tetap serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi.

- Dapat mengetahui dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi pada Instansi terkait sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Akademis

Dengan mereplikasi skripsi Anita Febrienne dari suatu objek yang berbeda dalam penelitian dengan harapan dapat memperkaya konsep dalam memberikan suatu gambaran, dan ilmu pengetahuan akuntansi dalam perkembangannya, khususnya yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi serta kebijakan akuntansi dan penatausahaan pada barang milik negara.

3. Manfaat Praktis

- Agar dapat membantu dalam menjalankan sistem informasi akuntansi dan perlakuan akuntansi yang telah dipelajari selama dalam perkuliahan. Serta dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir perkuliahan dalam mencapai gelar sarjana.
- Pada sisi praktis, dapat memberikan masukan lebih berarti dalam penelitian yang telah dilakukan ini dan dapat bermanfaat bagi Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- Diharapkan agar dapat menjadi suatu acuan dalam penelitian selanjutnya, dengan penelitian yang sama yaitu mengenai Sistem Informasi Akuntansi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini yaitu terdiri dari tiga bagian, antara lain bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian dari awal Tugas Akhir yaitu terdiri dari sampul, halaman judul, pengesahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik, daftar lampiran, dan ringkasa.

2. Bagian isi skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah menguraikan mulai dari Latar Belakang masalah, pada rumusan masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan pengertian yang dapat mendasari serta yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yang dapat menganalisa masalah dan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah ini. Adapun Teori yang digunakan berasal dari sumber lain yang valid dan literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini yang menguraikan mengenai metode dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta pengujian kredibilitas data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat suatu gambaran umum perusahaan, hasil dari penelitian yang telah di dapat, dan pembahasan mengenai analisis yang digunakan yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan dan sudah siap untuk menjadi bahan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini mengenai kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian serta rekomendasi. Dari 3 Bagian akhir yaitu terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.